

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dipaparkan hasil analisis penelitian dari temuan lapangan yang telah dilakukan. Analisis penelitian ditujukan untuk menjawab pertanyaan yang peneliti ajukan di bab pendahuluan mengenai proses kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi. Basis teori yang menjadi pisau analisis dalam penelitian ini ialah teori *Collaborative governance* yang ditulis oleh Ansell dan Gash (2007) dengan indikator kondisi awal (*starting condition*), design kelembagaan (*institutional design*), kepemimpinan fasilitatif (*fasilitative leadership*), dan proses kolaboratif (*collaborative process*).

#### **5.1 Dimensi Kondisi Awal Dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kabupaten Bekasi**

##### **5.1.1 Ketidakseimbangan Sumberdaya Antar *Stakeholders***

Masalah ketidakseimbangan sumberdaya merupakan masalah yang umum terjadi dalam pelaksanaan *collaborative governanace*, dimana jika *stakeholders* yang terlibat tidak memiliki organisasi, kapasitas, status, dan sumber daya yang kuat untuk berpartisipasi maka stakaeholders yang lemah akan mudah dimanipulasi oleh stakeholders yang lebih kuat (Ansell dan Gash, 2007). Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwa terjadi ketidak seimbangan sumber daya pada masyarakat dikarenakan masyarakat tidak memahami adanya kolaborasi. Ketidakseimbangan sumberdaya ini sesungguhnya mengganggu proses kolaboratif yang dilaksanakan karena perlu sebuah pemahaman antar stakeholders untuk mencapai keberhasilan dari kolaborasi yang dilakukan. Pada hasil penelitian juga didapatkan kurangnya pemahaman masyarakat terkait dengan kolaborasi dan kebijakan yang ada. Seperti masih terdapat bangunan-bangunan yang dibangun di Tanah milik Negara yang lokasinya sepanjang Daerah Aliran Sungai, serta masih membuang sampah sembarangan. Sulit untuk mengubah kebiasaan yang terjadi di

masyarakat jika pemerintah pun tidak memonitoring dan tidak memfasilitasi hal tersebut. Seharusnya pemerintah dapat memfasilitasi tempat pembuangan akhir sampah dan juga pelatihan-pelatihan dalam mengelola sampah dengan baik agar sampah-sampah tersebut tidak menghambat jalannya air di sepanjang sungai/kali yang dapat menyebabkan banjir.

Hasil penelitian menunjukkan jika memang masyarakat belum tereduksi dan terlatih dalam menanggulangi bencana banjir ini karena pelatihan dan edukasi yang dilakukan oleh BPBD sebagai Pemerintah belum menasar kepada masyarakat luas. Hanya masyarakat tertentu yang mendapatkan pelatihan dan juga berdasarkan penelitian yang dilakukan *stakeholders* yang terorganisir dan lebih kuat dalam hal ini pihak swasta dan pemerintah dianggap tidak mampu menjadi perwakilan yang merepresentasikan kepentingan masyarakat umum. Karena program kolaborasi ini masih berdasarkan permintaan dari pihak swasta untuk pegawai perusahaannya bukan untuk masyarakat. Pemerintahpun mengadakan pelatihan penanggulangan bencana ini hanya kepada masyarakat tertentu yang desa/kelurahannya sudah menjadi Destana atau Katana dan juga kepada beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Padahal salah satu faktor yang menjadikan keberhasilan dari sebuah kolaborasi adalah bisa memberikan pemahaman kepada seluruh *stakeholders* dan juga bisa merepresentasikan kepentingan masyarakat umum sebagai *stakeholders* individu yang dianggap lebih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa *stakeholders* yang terlibat hanya memikirkan keuntungan pribadi untuk pihaknya saja tidak untuk kepentingan masyarakat luas.

Namun disisi lain perlu dilihat jika pemerintah bukan hanya berkolaborasi dalam bentuk pelatihan tetapi juga berkolaborasi dalam bentuk bantuan. Dimana jika dilihat pada bab sebelumnya jika pemerintah telah menyediakan fasilitas ponsel pintar kepada Ketua RW yang fungsinya sebagai media diskusi dan informasi terkait apa yang terjadi dilapangan. Pemerintah akan memantau keadaan lapangan melalui grup WhatsApp yang telah dibentuk dan akan memberikan bantuan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terdampak bencana banjir. Namun ada hambatan dalam pengaplikasiannya di masyarakat yang ternyata Ketua RW

dianggap sebagai perwakilan dari masyarakat yang bisa memberikan informasi secara riil, tidak cakap menggunakan.

Kemampuan sumberdaya juga dibutuhkan dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir ini. Kemampuan sumberdaya ini juga menjadi salah satu yang menjadi masalah dalam kolaborasi yang dilakukan, seperti kemampuan pemerintah dalam membiayai kolaborasi yang dilakukan, kolaborasi pelatihan belum bisa mencapai masyarakat umum secara keseluruhan dikarenakan faktor pendanaan yang kurang. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap ketidakseimbangan sumberdaya yang ada maka yang diperlukan ialah adanya transparansi antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat dan perlunya forum secara resmi yang terorganisir agar setiap stakeholders dapat mengemukakan kendala dan kebutuhannya masing-masing dalam artian setiap stakeholders dapat saling mengisi kekurangan masing-masing dan saling melengkapi. Seperti pemerintah sebagai lembaga public yang dianggap cakap dan professional bisa memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat luas, pihak swasta dapat mendukung kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir dan masyarakat bisa ikut serta dalam kolaborasi yang dilakukan dengan menjaga lingkungan sedikit demi sedikit sehingga kolaborasi dapat berhasil.

### **5.1.2 Insentif Untuk Berpartisipasi Antar *Stakeholders***

Pada insentif antar stakeholders untuk berpartisipasi ini tidak dapat dipungkiri antar stakeholders yang berpartisipasi pasti memperhitungkan insentif yang akan didapat jika mereka terlibat dalam kolaborasi ini, termasuk pemerintah. Kolaborasi dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Bekasi ini melibatkan berbagai aktor didalamnya salah satunya ialah pihak swasta dan masyarakat. Dan perlu diketahui bahwasanya partisipasi diartikan sebagai hak antar stakeholders untuk ikut serta dalam mengambil keputusan dalam berkolaborasi. Mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dari kolaborasi yang dilakukan.

Dilihat dari hasil penelitian pada bab sebelumnya bahwasanya memang setiap stakeholders memperhitungkan keuntungan yang didapat dari kolaborasi yang

dilakukan. Seperti pihak swasta yang akan menolak kolaborasi yang diinisiasi oleh pemerintah jika didalamnya tidak ada keuntungan untuk mereka. Partisipasi dari pihak swasta memiliki keuntungan yang dapat dikur dan jelas bahwa mereka berkolaborasi sesuai dengan kesepakatan yang dibuat Bersama pemerintah. Dalam hal ini perlu disoroti ialah masyarakat sebagai objek dari implementasi program. Apakah masyarakat umum diikutsertakan dalam mengambil keputusan pada program atau hanya sekedar objek dari sebuah program yang direncanakan pemerintah. Masyarakat cenderung diposisikan sebagai objek bukan sebagai subjek. Hal ini seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya jika pemerintah memfasilitasi forum dengan sebuah aplikasi *WhatsApp* yang digunakan untuk menerima informasi terkait bencana banjir yang terjadi dan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tidak ada forum terbuka yang khusus untuk membahas mengenai bencana banjir dengan masyarakat umum untuk mencari solusi bersama dalam menanggulangi banjir. Hal ini menjadi salah satu penyebab kurangnya partisipasi masyarakat dalam meminimalisir resiko bencana banjir dengan cara menjaga lingkungan karena kurangnya komunikasi dengan *stakeholders* lain.

Hal ini tentu menjadi salah satu hambatan dalam penanggulangan bencana banjir dimana keberhasilan program bisa terjadi jika masyarakat ikut berpartisipasi secara luas, namun yang terjadi berdasarkan hasil penelitian bahwa masyarakat selalu memperhatikan keuntungannya juga disatu sisi mendukung untuk tidak terjadinya banjir namun juga mengaharapkan banjir karena akan mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, seperti pemerintah dan pihak swasta. Hal ini mungkin saja terjadi karena tingkat Pendidikan yang rendah dimana mayoritas Pendidikan sampai SD. Dapat disimpulkan bahwasanya pada kolaborasi yang dilakukan pemerintah, masyarakat umum kurang memahami program pemerintah, masyarakat hanya menjalani apa yang diprogramkan oleh pemerintah, karena tidak diikutsertakan dalam pengambilan keputusan yang buat oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang dan tidak memiliki power untuk berpartisipasi aktif. Namun tidak dipungkiri bahwasanya hal yang mendorong *stakeholders* yang terlibat dalam

penanggulangan banjir ini ialah karena rasa kemanusiaan walaupun mengalami beberapa hambatan

### **5.1.3 Sejarah Konflik Atau Kerjasama**

Ansell dan Gash (2007) bahwasanya sejarah konflik atau kerjasama antar stakeholders ini bisa menjadi suatu pendorong atau penghambat dalam proses kolaborasi. Kolaborasi akan berhasil jika stakeholders merasa memiliki ketergantungan dengan yang lainnya, dan adanya upaya yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari para stakeholders setelah adanya sejarah konflik atau kerjasama. Dilihat dari hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya menunjukkan bahwasanya kerjasama atau kolaborasi penanggulangan banjir yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bekasi ini bukan kerjasama pertama Pemerintah Daerah, namun Bagian Kerjasama Sekretariat Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi tidak mengetahui adanya kolaborasi baik dalam penanggulangan bencana keseluruhan ataupun dalam penanggulangan bencana banjir. Konflik dalam kolaborasi bisa saja terjadi jika stakeholders menuntut kedudukan yang sama dalam berperan. Berdasarkan hasil dari observasi yang dilakukan PP Nomor 21 tahun 2008 dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 menunjukkan jika setiap stakeholders dalam hal ini pihak swasta dan masyarakat memiliki kedudukan yang sama secara hukum. Tetapi temuan lapangan menunjukkan jika masih terdapat kesenjangan berperan dalam kolaboratif penanggulangan bencana ini, masyarakat umum belum diberikan kesempatan berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan. Namun konflik yang terjadi tidak sampai mengacaukan program yang telah dibuat.

## **5.2 Dimensi Kepemimpinan Fasilitatif Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi**

Pada teori Ansell dan Gash (2007), Chrislip dan Larson (1994) mengatakan jika pemimpin kolaboratif dicirikan fokusnya pada mempromosikan dan menjaga proses. Sedangkan Lasker dan Weiss (2005) berpendapat jika terdapat beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin kolaboratif, ialah

mempromosikan partisipasi yang luas, Memastikan pengaruh kontrol berbasis luas, memfasilitasi dinamika kelompok yang luas, dan memperluas cakupan proses. Setelah dilakukan wawancara, observasi dan telaah dokumen pada penelitian kolaboratif dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi pemimpin mengupayakan mempromosikan partisipasi *stakeholders* hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang telah dilakukan namun, belum menyeluruh hal ini dapat dilihat dari beberapa informan yang tidak mengetahui tentang program kolaborasi yang telah dibentuk BPBD. Belum luasnya pemimpin mempromosikan partisipasi dalam program kolaboratif ini juga diakui oleh BPBD jika memang sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh disebabkan oleh banyaknya *stakeholders* sehingga pemimpin membutuhkan waktu yang cukup lama dimana sampai saat ini masih terus berjalan. Pemerintah memprioritaskan masyarakat yang daerahnya sudah menjadi Destana dan juga pihak-pihak swasta yang menjadi cakupan dalam mempromosikan program kolaboratif ini, namun jika daerah tersebut belum menjadi Destana seperti Desa Pantai Hurip contohnya, masyarakat kurang memahami mengenai program kolaboratif. Namun bukan berarti tidak ada kolaboratif yang dilakukan, karena secara alamiah masyarakat Desa Pantai Hurip jika terjadi banjir maka akan merangkul pihak-pihak lain untuk berpartisipasi memberikan bantuan termasuk perusahaan-perusahaan namun memang mayoritas diwarnai dengan Ormas.

Selanjutnya keterampilan lain yang harus dimiliki pemimpin dalam berkolaborasi ialah memastikan luasnya pengaruh dan kontrol. Dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir ini luasnya pengaruh dan kontrol dari pemerintah ditunjukkan oleh Kepala bidang yang diamanahkan tugas oleh Kepala BPBD Kabupaten Bekasi memantau dan membina secara langsung proses kolaborasi yang dilakukan. Dalam menjalankan program kolaborasi ini pemimpin selain memastikan luasnya kontrol juga memastikan bahwasanya memiliki pengaruh dalam kolaborasi ini. Penelitian yang dilakukan menunjukkan jika pengaruh pemimpin belum menunjukkan jika pengaruhnya luas hal ini didapatkan berdasarkan wawancara dan observasi yang dilakukan dimana pemimpin sudah berdiskusi

dengan masyarakat untuk relokasi namun masyarakat menolak untuk dilakukan relokasi karena tempat tinggal mereka saat ini sudah ditinggali lama.

Keterampilan lain yang harus dimiliki pada kepemimpinan fasilitatif ialah pemimpin memperluas cakupan kolaborasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan jika kolaborasi ini dalam lingkup pemerintahan pemimpin melibatkan seluruh SKPD yang terkait termasuk juga BPBD, Bappeda, Dinas Sumber Daya Air (SDA), bina marga dan konstruksi; Dinas cipta karya; Dinas lingkungan hidup; Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PURP); Dinas Sosial; Dinas Kesehatan; dan Pemadam kebakaran. Selain SKPD yang terlibat pemerintah juga meluaskan cakupan kolaborasinya dengan pihak swasta serta masyarakat. Dimana dalam hal memperluas cakupannya kepada masyarakat pemerintah bergerak selaras dengan pembentukan Destana yang masih berlangsung hingga saat ini, pemerintah belum optimal dalam memperluas cakupan dalam kolaborasinya kepada masyarakat umum. Dalam pelaksanaannya pemerintah sebagai pemimpin daerah dibantu untuk memperluas cakupan kolaborasinya melalui tokoh masyarakat setempat, namun ternyata terjadi kendala dalam pensosialisasiannya dimana tokoh masyarakat hanya melakukan upaya dalam penanggulangan bencana tidak mengungkapkan kolaborasi. Dan yang menjadi salah satu penghambat ialah sulitnya mengubah kebiasaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

### **5.3 Dimensi Desain Kelembagaan Dalam Peanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi**

Dimensi ketiga yang mempengaruhi proses kolaboratif ialah desain kelembagaan. Menurut Ansell dan Gash (2007) bahwasanya desain kelembagaan ini mencakup adanya aturan yang jelas untuk berkolaborasi yang sangat penting untuk meligitimasi prosedural dari proses kolaboratif. Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya didapatkan jika dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi ini pemerintah menggunakan Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagai aturan dasar untuk berkolaborasi. Peraturan Daerah ini menjelaskan bahwasanya Pemerintah

Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga pemerintah, BUMN/BUMD, swasta, lembaga kemasyarakatan dan pihak lainnya baik di dalam maupun luar negeri. Perda ini merujuk kepada aturan di atasnya yaitu PP Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam PP ini dijelaskan mengenai bentuk peran dan partisipasi yang bisa pihak swasta dan masyarakat lakukan dalam berkolaborasi pada penanggulangan bencana banjir ini.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disebutkan jika aturan dasar dalam berkolaborasi ialah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Perka BNPB, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Untuk perjanjian kerjasama terkait dengan kolaborasi dalam bentuk pelatihan belum ada, namun untuk kolaborasi dalam bentuk pemberian bantuan sudah ada perjanjian kerjasamanya dalam bentuk MoU dengan pihak swasta. Hal ini menunjukkan jika perjanjian kerjasama yang dilakukan tidak melibatkan seluruh *stakeholders* namun hanya antara pemerintah dengan dunia usaha.

Hasil penelitian juga menunjukkan siapa saja pihak yang terlibat dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir yang memiliki tupoksinya masing-masing sehingga terlihat mekanisme dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi. *Stakeholders* yang terlibat ialah masyarakat, pihak swasta, lembaga masyarakat dan pemerintah daerah mengapa demikian karena dalam kolaboratif ini pengikutsertaan *stakeholders* menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam program ini. Keikutsertaan BPBD jelas sebagai *leading sector* yang menangani kebencanaan dengan melakukan pengumpulan dan pengelolaan data, membentuk jaringan komunikasi dengan pihak lain, memberikan dukungan dengan berbagai SKPD yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir.

Hasil penelitian juga menunjukkan jika BPBD melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang kemudian dikoordinasikan kepada SKPD terkait. Seperti saat pra bencana terdapat laporan dari masyarakat untuk dilakukan normalisasi



sungai yang kemudian BPBD koordinasikan dengan dinas bina marga dan sumber daya air dan selanjutnya berkolaborasi dengan dinas lingkungan hidup. Selanjutnya jika saat terjadinya bencana maka BPBD akan berkoordinasi dengan dinas sosial untuk memberikan bantuan logistik/dapur umum untuk korban banjir. Kemudian pada saat setelah terjadinya bencana maka yang berperan ialah BPBD yang berkoordinasi dan berkolaborasi dengan dinas PUPR dan dinas bina marga dan sumber daya air untuk mengani permasalahan infrastruktur akibat terjadinya bencana banjir, disamping itu BPBD juga berkolaborasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan pemulihan baik secara fisik ataupun mental masyarakat akibat terjadinya banjir.

Keikutsertaan pemerintah pada dinas-dinasnya tidak selaras dengan partisipasi masyarakat sesuai dengan temuan lapangan yang menunjukkan bahwa unsur masyarakat belum diikutsertakan secara inklusif dan terbuka padahal jelas tertulis dalam aturan dasar, yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana jika setiap orang berhak dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya. Hal ini bisa dilihat pada penjelasan sebelumnya jika pemahaman masyarakat terhadap program kolaborasi ini kurang.

Dalam Ansell dan Gash (2007), Murdock, dkk (2005) menjelaskan bahwa aturan dasar yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat meyakinkan stakeholders bahwa proses kolaboratif terlaksana dengan adil, merata dan terbuka. Artinya proses kolaborasi dikatakan terlaksana dengan baik jika diterapkan secara merata, terbuka, dan adil, meninjau dari hasil penelitian yang dijelaskan pada bab sebelumnya jika kolaborasi pelatihan baru hanya dilakukan kepada masyarakat yang desanya sudah menjadi Destana ataupun kepada pihak swasta yang ditujukan kepada pegawainya dan tidak tertuju kepada masyarakat umum Kabupaten Bekasi tentu saja hal ini tidak mencerminkan aturan dasar yang ada dimana setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## **5.4 Dimensi Proses Kolaborasi Dalam Penanggulangan Banjir di Kabupaten Bekasi**

### **5.4.1 Indikator Terdapat Dialog Tatap Muka Antar Para Pemangku Kepentingan**

Ansell dan Gash (2007) mengatakan bahwasanya dialog tatap muka ini merupakan suatu proses yang diperlukan bagi para stakeholders untuk membangun collaborative governance sebagai proses mencapai konsensus bersama. Berdasarkan hasil penelitian jika terdapat dialog tatap muka antara pihak swasta dan pemerintah dalam pertemuan yang intensitasnya tidak rutin sesuai dengan kebutuhan saja pada kolaborasi ini semua perusahaan terlibat namun tidak bisa ditemukan data mengenai daftar hadir forum dan data yang lainnya. Kemudian pemerintah juga mengadakan pertemuan dengan SKPD terkait mulai dari saat pra bencana sampai pasca bencana, namun data yang didapatkan tidak menemukan intensitas pertemuan antar SKPD ini serta kapan dan siapa saja yang terlibat didalamnya pada setiap forum yang diadakan. Jika keterlibatan stakeholders antar pemerintah dan pihak swasta sudah dilibatkan maka yang perlu diperhatikan ialah pihak masyarakat. Pemerintah daerah memfasilitasi dialog dengan masyarakat melalui media chatting WhatsApp untuk menginformasikan terkait dengan penanggulangan banjir namun masyarakat tidak memahami apakah grup *WhatsApp* tersebut merupakan kolaborasi atau bukan.

Dialog tatap muka ini mempertemukan stakeholders yang menjadi aktor dalam penanggulangan bencana termasuk bencana banjir ini menunjukkan jika dialog yang terjadi dalam kolaborasi ini ialah antara pemerintah dengan stakeholders lain pada forum individual. Seperti pada kolaborasi pelatihan yang hanya melibatkan pihak swasta dan BPBD, lalu terdapat juga forum antara SKPD dan juga BPBD. Kemudian untuk kolaborasi bantuan memang melibatkan masyarakat, pemerintah dan juga pihak swasta namun mereka tidak berdialog secara bersama dalam satu forum resmi ataupun tidak resmi. Maksudnya ialah seperti masyarakat yang menginformasikan melalui *WhatsApp* terkait bencana yang

terjadi kepada pemerintah kemudian pemerintah mengolah data tersebut untuk diberikan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana banjir.

#### **5.4.2 Indikator Terdapat Rasa Saling Percaya Antar Para Pemangku Kepentingan**

Membangun kepercayaan merupakan suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan dari komitmen, dan kepercayaan serta komitmen dilihat sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari adanya dialog tatap muka. Membangun kepercayaan berarti proses membangun komitmen jangka panjang. Ansell dan Gash (2007) mengatakan jika kepercayaan tidak terpisahkan dari dialog tatap muka dan negosiasi. Selain dialog tatap muka dan negosiasi, kepemimpinan fasilitatif juga menjadi begitu penting dalam membangun kepercayaan karena dibutuhkan pemimpin yang dapat menjadi mediator dan distributor dalam proses kolaborasi. Hasil penelitian menunjukkan jika memang kepercayaan bisa timbul karena adanya negosiasi dan dialog tatap muka. Walaupun dialog tatap muka yang dilakukan tidak rutin namun ternyata hal tersebut menghasilkan kepercayaan pada pihak swasta dimana pihak swasta akan ikut berpartisipasi pada penanggulangan bencana jika BPBD memiliki data mengenai kebencanaan termasuk dengan bencana banjir. Hal tersebut menunjukkan jika adanya negosiasi antar stakeholders pemerintah dengan pihak swasta. Hal tersebut juga terjadi antara pihak pemerintah dengan masyarakat dimana masyarakat berperan untuk menginformasikan terkait dengan kejadian banjir, masyarakat terkena dampak, kebutuhan dasar yang diperlukan serta terkait dengan korban dan kerusakan yang ditimbulkan kemudian pemerintah akan datang untuk meninjau serta memperbaharui data dan memberikan bantuan kedaruratan sembari memberikan data faktual tersebut kepada pihak swasta. Dalam proses ini masyarakat memperhitungkan insentif mereka walaupun tidak memahami bahwa tindakannya merupakan sebuah aktivitas kolaboratif.

### **5.4.3 Indikator Terdapat Komitmen Bersama Antar Para Pemangku Kepentingan**

Komitmen dari para stakeholders dalam melakukan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan kolaborasi, termasuk juga pada kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Bekasi ini. Burger (2001) dalam Ansell dan Gash (2007) menyebutkan bahwasanya komitmen terhadap proses berarti mengembangkan keyakinan bahwa negosiasi demi keuntungan bersama adalah cara terbaik untuk mencapai keberhasilan dalam kolaborasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwasanya komitmen pemerintah sejak awal ialah menanggulangi banjir terlebih lagi melihat kondisi geografis dan astronomis Kabupaten Bekasi serta kajian risiko bencana yang menunjukkan jika risiko Kabupaten Bekasi terhadap banjir dikategorikan tinggi sehingga pemerintah berupaya menanggulangi bencana banjir dengan melibatkan stakeholders lain untuk ikut berkomitmen dalam menanggulangi banjir serta upaya preventif daari mulai pra bencana seperti melakukan pelatihan dengan stakeholders lain. Hal ini menunjukkan terdapat komitmen antar stakeholders yang meski komitmen tersebut belum menunjukkan komitmen yang kuat karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya jika kolaborasi pelatihan yang dilakukan belum untuk masyarakat umum yang seharusnya masyarakat umum dapatkan. Ansell dan Gash (2007) bahwasanya membangun kepercayaan dan komitmen ini merupakan proses yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Dalam menanggulangi bencana banjir dalam kolaborasi ialah kolaborasi bantuan dilakukan pada saat terjadinya bencana. Dalam kolaborasi ini indikator terdapat komitmen antar stakeholders menunjukkan sudah terdapat komitmen bersama antar stakeholders yang walaupun dilakukan pada forum yang berbeda namun komitmen dapat tercapai. Hasil observasi penelitian yang dilakukan menunjukkan jika masyarakat dan pegawai Desa Pantai Hurip tidak berkomitmen dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir. Hal ini disebabkan oleh terdapat banyak bangunan tetap yang memenuhi daerah sepanjang aliran sungai/kali yang mana daerah tersebut daerah yang dilarang untuk dibangun.

#### **5.4.4 Indikator Terdapat Pemahaman Bersama Antar Para Pemangku Kepentingan**

Setiap kelompok organisasi memiliki tujuan yang berbeda-beda dengan cara yang berbeda. Oleh karena itu, dalam hal menanggulangi bencana banjir ini para stakeholders diminta untuk menyamakan visi misi agar penanggulangan bencana banjir ini bisa teratasi dan berjalan dengan baik dikarenakan sudah memiliki tujuan yang sama. Dalam hal ini pemerintah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan lebih dari lembaga yang lain diharapkan bisa memfasilitasi dan memberikan pemahaman kepada seluruh *stakeholders* terkait dengan tujuan dari adanya kolaborasi dalam menanggulangi bencana. Walaupun pada pelaksanaannya belum tercapai karena *stakeholders* yang terlibat belum memahami visi dan misi dari kolaborasi dalam penanggulangan banjir ini. Kolaborasi yang efektif ialah dengan membangun pemahaman bersama melalui diskusi gagasan antar stakeholders untuk menyelesaikan sebuah masalah. Di Kabupaten Bekasi ini terlihat jelas jika dalam kolaborasi tidak terlebih dahulu berdiskusi dengan stakeholders yang terlibat. Kolaborasi yang dilakukan oleh Kabupaten Bekasi dalam penanggulangan banjir ini merupakan hasil kebijakan dari pemerintah semata.

#### **5.4.5 Indikator Terdapat Hasil Sementara Antar Para Pemangku Kepentingan**

Pada kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir ini walaupun mengalami beberapa hambatan namun terdapat hasil sementara seperti semakin luasnya cakupan pemimpin dalam mempromosikan program kolaborasi selaras dengan terbentuknya Destana yang semakin bertambah. Dengan adanya penambahan Destana maka semakin luasnya cakupan sosialisasi terkait dengan program kolaborasi penanggulangan bencana banjir ini. Hasil sementara lainnya ialah pembagian peran yang sama antar stakeholders yang terlibat namun pelaksanaannya masyarakat belum dilibatkan dalam pengambilan keputusan pada program kolaborasi. Tujuan yang jelas pada program kolaborasi ini akan menjadi satu pendorong untuk mencapai keberhasilan program.